p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

MODEL RANCANGAN KERJA SAMA SISTER CITY KOTA KEMBAR BANJARMASIN DALAM TATA KELOLA LINGKUNGANLAHAN BASAH (*WETLAND GOVERNANCE*)

M. Najeri Al Syahrin*, Mahyuni, Terry Tabitha,Husama Riyadi, Anisa Rahmah
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat
Jl B. HasanBasri Kayutangi, Banjarmasin, Indonesia
**Corresponding Author*: M Najeri Al Syahrin, najeri.syahrin@ulm.ac.id

Abstrak. Penelitian ini menganalisis model kerangka kerja sama sister city yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Banjarmasin dalam tata kelola lingkungan lahan basah (wetland governance). Rancangan model kerja sama sister city yang akan dilakukan yaitu melalui kerja sama model bottom up. Model kerja sama ini menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat (citizen diplomacy) dan kolaborasi masyarakat sebagai aktor transnasional dalam tata kelola lingkungan lahan basah (wetland governance) di Banjarmasin. Partisipasi masyarakat (citizen diplomacy) dan kolaborasi aktif masyarakat dengan pemerintah kota sebagai aktor transnasional, telah menjadi kajian baru yang menarik diteliti dalam pemerintahan dan hubungan internasional sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut. Model tata lingkungan lahan basah dalam model ini adalah pengelolaan lingkungan lahan basah secara terpadu. Selama ini metodologi perencanaan pengelolaan lingkungan lahan basah secara terpadu kurang memperhatikan aspek-aspek yang mengintegrasikan antara kelembagaan, teknologi dan pendanaan. Operasionalisasi konsep lingkungan lahan basah terpadu sebagai satuan unit perencanaan dalam pembangunan selama ini masih terbatas pada upaya rehabilitasi dan konservasi tanah dan air, sedangkan organisasi masih bersifat ad.hoc, dan kelembagaan yang utuh tentang pengelolaanlingkungan lahan basah belum terpola. Agar pengelolaan lingkungan lahan basah dapat dilakukan secara optimal, maka perlu dilibatkan seluruh pemangku kepentingan dan direncanakan secara terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan lahan basah sebagai suatu unit pengelolaan. Model kerjasama sister city bottom up kemudian dibuat berdasarkan permasalahan tersebut. Kerja sama ini merupakan upaya untuk melibatkan semua pihak khususnya masyarakat sehingga setiap keputusan yang diambil dalamperencanaan adalah keputusan kolektif, dan mendorong keterlibatan serta komitmen bersama untuk melaksanakannya.

Kata kunci : Model kerja sama, sister city, tata kelola, lingkungan lahan basah.

1. PENDAHULUAN

Banjarmasin atau Kalimantan Selatan secara khusus merupakan wilayah lahan basah atau lahan gambut. Mayoritas wilayahnya tergenang air baik secara musiman (jangka pendek) maupun permanen (jangka panjang). Selain itu, lahan basah menjadi sangat peka terhadap perubahan yang dilakukan manusia serta lahan basah memiliki peran penting bagi kehidupan manusia dan margasatwa lain (Rahmi *et al*., 2015). Dengan demikian, tata kelola lingkungan lahan basah (*wetland governance*) sangat diperlukan dalam pengelolaan lahan basah. Masalahnya, selama ini sistem tata kelola lingkungan lahan basah seringkali menjadi tumpang tindih dan benturan antara satu pemangku kepentingan dengan pemangku kepentingan lainnya serta tidak maksimalnya peran serta masyarakat (*society involvement*) dalam tata kelola lingkungan lahan basah. Selama ini perencanaan, pengelolaan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi tata kelola lingkungan lahan basah (*wetland governance*) seringkali dilakukan secara terpisah (Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah, 2004). Tata kelola lingkungan lahan basah *(wetland governance)* secara tepat dan menyeluruh perlu melibatkan semua pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang terkait langsung dengan lahan basah.

Transformasi isu global yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional seperti contohnya perubahan iklim global, globalisasi kebudayaan, kebijakan pembangunan, pertambahan penduduk, kelangkaan air bersih energi dan bahan bakar disisi lain telah memberikan tekanan terhadap keberlanjutan dan kelestarian lahan basah di Indonesia, hal ini karena lahan basah cukup rentan terhadap perubahan lingkungan. Di sisi yang lain juga bisa dilihat, perubahan internasional akibat globalisasi menyebabkan pergeseran pelaksanaan hubungan negara dan pemerintahan. Kemajuan teknologi komunikasi juga telah mendorong saling ketergantungan tidak hanya bagi negara tetapi juga kelompok-kelompok dalam negara termasuk pemerintah daerah (Buckley *et al*., 2015). Fenomena tersebut membuat pemerintah daerah tertarik untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di negara lain untuk mendapatkan keuntungan bagi daerahnya. Bentuk kerja samabilateral yang saat ini banyak dilakukan adalah dengan model kerja sama *sister city* (mitra kota). *Sister city* adalah bentuk kerja sama yang melibatkan kota di suatu negara dengan kota di negara lain untuk meningkatkan rasa persaudaraan antarkota dan memberi manfaat bagi kedua kota tersebut (Ogawa, 2012). Kerja sama sister city hadir untuk mengupayakan perkembangan daerah tidak hanya terjadi dalam bidang profit ekonomi saja tetapi juga mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan (Mukti, 2013). Terbentuknya kerja sama *sister city* jugamenunjukkan bahwa setiap pemerintah daerah tidak selamanya dapat mengandalkan potensi dalam negerinya untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi dapat dipenuhi oleh negara lain melalui sebuah skema kerja sama (Fitri & Rani, 2013; Al Syahrin *et al*., 2019).

Pengelolaan lingkungan lahan basah sangat dinamis dan bertransformasi secara cepat sesuai dengan perkembangan teknologi, pengalaman kasus baru, faktor politik sosial ekonomi serta pengaruh internasional (globalisasi). Maka daripada itu sangat

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

diperlukan kerangka kerja sama bersama antar pemerintah kota supaya bisa bersinergi satu sama lainnya. (Baritono, 2017; Boersma, 2016; Balenthine, 2014). Oleh sebab itu, maka diperlukan kerangka baru dalam penataan dan tata kelola lingkungan lahan basah (*wetland governance*) terpadu melalui kerja sama *sister city*. Dalam kerja sama *sister city*, manajemen tata kelola lingkungan lahan basah akan melibatkan berbagai ahli di dunia internasional, yang selama ini sudah berpengalaman dalam mengatasi permasalahan serupa di negaranya. Selain itu, kerja sama *sister city* juga memungkinkan transfer teknologi dalam penanganan tata kelola lingkungan lahan basah (*wetland governance*), sehingga diharapkan melalui mekanisme kerja sama, permasalahan tata kelola lingkungan lahan basah dapat terlaksana dengan baik.

Melihat banyaknya manfaat dari pelaksanaan kerja sama sister city serta urgensi permasalahan tata kelola lingkungan lahan basah (*wetland governance*) yang kini masih belum bisa diselesaikan dengan baik, kami selaku peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang model kerja sama sister city dalam tata kelola lingkungan lahan basah (*wetland governance*) di kota Banjarmasin. Permasalahan tata kelola lingkungan lahan basah (*wetlandgovernance*) selama ini sudah menelan banyak biaya dan waktu yang panjang dalam proses penyelesaiannyanamun hingga kini masih belum terdapat hasil yang efektif. Ironisnya, di sisi yang lain bila diamati, banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh melalui kerja sama *sister city*. Dari sini menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam, bagaimana model kerja sama *sister city* yang baik untuk dilaksanakan sehingga permasalahan tata kelola lingkungan lahan basah (*wetland governance*) dapat diselesaikan dengan baik.

2. METODE

Penelitian model kerja sama *sister city* ini dikembangkan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini menggunakan studi literatur dan metode wawancara untuk menelaah dan memahami bagaimana model pengembangan kerja sama sister city yang baik untuk diterapkan tata kelola lingkungan lahan basah *(wetland governance*) di Banjarmasin. Riset kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami tata kelola lingkungan lahan basah (*wetland governance*) serta memberikan model kerja sama *sister city* yang efektif dalam tata kelola tersebut. Hal yang menarik dari penelitian ini adalah pembuatan model dan platform kerja sama sister city tata kelola lingkungan lahan basah (*wetland governance*) kota Banjarmasin dengan keterlibatan aktifmasyarakat (*citizen diplomacy*). Harapannya melalui kerja sama ini akan bisa memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat kota Banjarmasin.

Metode yang akan digunakan dalam menentukan sumber data primer atau narasumber adalah *purposivesampling* melalui narasumber pilihan. Untuk memudahkan penentuan informan di lapangan, peneliti menargetkan informan kunci sebagai berikut:

1. Pemerintah kota Banjarmasin (Bagian Umum, Bagian Pembangunan, Bagian Kesra) dan Badan Lingkungan Hidup.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode yang saling mendukung guna mempertajam analisis data tentang pembuatan model kerja sama *sister city*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model kerja sama *sister city* atau kota kembar merupakan sebuah model kerja sama antara kota satu dengan kota lain yang sifatnya transnasional yang didasari atas kesamaan hal seperti permasalahan bencana,geografis, ekonomi, struktur sosial, budaya dan hal lainnya yang memiliki kesamaan yang dimiliki kedua kota tersebut (Al Syahrin *et al*., 2020). Penelitian ini berencana membuat model penelitian kerja sama *sister city* di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami selaku pelaksana penelitian berencana menjadikan permasalahan kota ini sebagai media kerja sama *sister city* dengan asumsi kedepannya permasalahan ini mampu diatasi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Pada penelitian ini kami juga melibatkanmasyarakat yang berada di kawasan lingkungan lahan basah untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian *sister city.*

3.1 Studi Analisis Pelibatan Masyarakat Dalam Penanggulangan Lingkungan Lahan Basah di Banjarmasin

Pelaksanaan penelitian model kerja sama *sister city* di kota Banjarmasin telah dilakukan dengan menghubungi beberapa pihak terkait seperti pemerintah kota Banjarmasin, dan masyarakat sebagai aktor dalam pelaksanaan *sister city*, dan melakukan survey lapangan terkait daerah yang akan dijadikan sebagai pelaksanaan kerja sama sister city di Banjarmasin. Adapun proses pelaksanaan penelitian kerja sama *sister city* dimulai dengan menghubungi pemerintah kota Banjarmasin di Balai Kota Banjarmasin yang dilakukan pada 29September 2020. Dari pemerintah kota Banjarmasin menjelaskan bahwa di kota Banjarmasin sendiri belum ada proses pelaksanaan kerja sama *sister city* secara spesifik dalam tata kelola lingkungan lahan basah. Hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah kota Banjarmasin itu sendiri. Kendala yang dialami oleh pemerintah kota Banjarmasin yaitu pertama masalah pendanaan kerja sama *sister city* oleh kota pemerintah Banjarmasin belum terealisasi. Kedua, Belum terintegrasi antar unit satu dengan unit lainnya sehingga belum terjalin komunikasi yang baik untuk pelaksanaan model perencanaan kerja sama *sister city* ini.

Dua kendala inilah yang menjadi permasalahan mengapa pemerintah kota Banjarmasin belum menjalankan model kerja sama sister city secara spesifik dalam tata kelola lingkungan lahan basah hingga saat ini. Informasi yang didapatkan dari pemerintah kota Banjarmasin

untuk pelaksanaan kerja sama sister cityguna mengatasi permasalahan lingkungan lahan basah ini telah juga diwacanakan. Rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah kota Banjarmasin untuk penelitian ini yaitu dengan mengunjungi PUPR kota Banjarmasin, yang mana dinas inimerupakan dinas yang menangani permasalahan lingkungan lahan basah di Kota Banjarmasin. Rekomendasiselanjutnya yaitu ke BAPPEDA kota Banjarmasin bidang prasarana wilayah, dimana bidang ini ikut berperan dalam penanganan lingkungan lahan basah di kota Banjarmasin. Poin ini yang menjadi laporan data yang mendukung jalannya penelitian model kerja sama sister city di Kota Banjarmasin.

Penelitian selanjutnya dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, yang diwakilkan oleh Ibu Dwi Naniek Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Dalam pemaparannya disampaikan bahwa, Institute for Global Environmental Strategies (IGES) yang berpusat di Jepang memberikan pujian atas keberhasilan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,dalam mengurangi sampah kantong plastik. Programme Manager Sustainable Cities dari IGES Shom Teoh, saat mengunjungi Balai Kota Banjarmasin, mengungkapkan pihaknya datang untuk melihat langsung kemajuan Kota Banjarmasin dalam hal penanganan sampah kantong plastik. Banjarmasin menjadi perwakilan Indonesia di ASEAN di sektor keberhasilan mengurangi penggunaan sampah kantong plastik, hingga sangat maju melindungi lingkungan hidup (Ratnawati *et al*., 2020).

Upaya dalam mendesain kerja sama sister city selayaknya dilakukan dengan pelibatan aktif masyarakat.Hal ini dikarenakan, masyarakatlah yang nanti menjadi komponen penting dalam teknis pelaksanaan kerja sama. Upaya keterlibatan masyarakat dalam penataan lingkungan lahan basah di Banjarmasin bisa terlibat dari kegiatan dan aktivitas berikut. Upaya pencegahan naiknya suhu bumi akibat adanya emisi gas rumah kaca diwilayah Kalimantan Selatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berupaya memberikan sosialisasi ke berbagai wilayah. Kegiatan sosialisasi yang menghadirkan sejumlah Lurah dan Kelompok Masyarakat Peduli lingkungan di Banjarmasin dengan di fasilitasi DLH Kota Banjarmasin. Sosialisasi pun terus digencarkan agar masyarakat mampu memahami dampak buruk akibat perubahan iklim dan mampu melakukan adaptasi serta mitigasi yaitudengan menerapkan program Kampung iklim (Proklim). Pemberian sosialisasi kepada 11 lurah yang ada di Kota Banjarmasin ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada para lurah untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat yang ingin membentuk Kampungnya menjadi Kampung Iklim. Realisasi program ini sudah terlihatyakni terbentuknya Kampung Iklim Di Komplek H Idris Sultan Adam Kelurahan Sungai Miai dan Kampung Hijau di Kelurahan Sungai Bilu Banjarmasin (Kalsel Pos, 2019).

Selain program rumah iklim, keterlibatan masyarakat secara khusus oleh pegiat lingkungan melalui kegiatan inovasi berupa program jemput sedekah sampah bagi warga yang ingin menukarkan sampahnya di bank sampah. Inovasi tersebut dilakukan oleh Bank Sampah Induk "Baiman" Banjarmasin. Masyarakat yang belum dilayani oleh bank sampah pun dapat dilayani oleh bank sampah lewat jemput sedekah sampah. Barang- barang rongsokan tersebut akan didaur ulang oleh tim kreatif bank sampah induk sehingga dapat digunakan kembali. Banjarmasin kini telah memiliki 275 bank sampah yang sudah dapat mengatasi lebih dari 200 ton sampah per bulannya. Pada tahun 2017, justru bank sampah induk Banjarmasin menjadi salah satu dari enambank sampah terbaik di Indonesia (Pikiran Rakyat, 2019).

Berikut adalah gambaran tentang aspek keterlibatan masyarakat dalam penanganan lingkungan lahan basah:

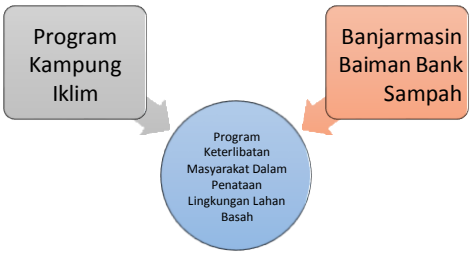

Gambar 1. Program Keterlibatan Masyarakat dalam Penanganan Lingkungan Lahan Basah Banjarmasin (Sumber; Diolah Penulis).

Dari data di atas terlihat bahwa pelaksanaan keterlibatan masyarakat cukup terlihat aktif. Padahal, partisipasi masyarakat dalam tata kelola lingkungan sangatlah penting dan perlu untuk ditingkatkan. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat ini akan meringankan upaya pemerintah dalam penataan lingkungan lahan basah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah melalui Dinas terkait dapat lebih meningkatkan sosialisasi dan aktif melibatkan masyarakat dalam segala bentuk kegiatan. Partisipasi masyarakat merupakan proses teknis untuk memberi kesempatan dan wewenang lebih luas kepada masyarakat, agar masyarakat mampu memecahkan berbagai persoalan bersama-sama. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Disamping itu partisipasi masyarakat juga bertujuanuntuk mencari solusi permasalahan lebih baik dalam suatu komunitas, dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk memberi kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan (Subhan, 2012).

Untuk merealisasikan program-program penataan lingkungan lahan basah, pemerintah harus lebih giat melakukan sosialisasi

kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah dapat membina dan melatih tokoh-tokoh masyarakat. Selanjutnya tokoh-tokoh masyarakat dapat langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai pertemuan/kegiatan yang sering dilakukan seperti pengajian (yasinan) dan gotong royong. Kegiatan madihin sebagai tradisi kesenian khas Adat Banjar juga dapat dilakukan untuk menarik minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan tentang pengelolaan lingkungan. Selain itu, pemerintah dapat juga memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi melalui lomba-lomba seperti lomba kebersihan desa, penataan sungai, pengelolaan lahan basah dan lain-lain (Subhan, 2012).

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan juga hanya bersifat partisipasi konsultasi dan partisipasi yang didorong dengan insentif atau bantuan. Pemaknaan pengelolaan lingkungan secara tidak langsung terlihat dari pandangan masyarakat yang tinggal di pinggir sungai dan tercermin dari kehidupan sehari-hari mereka; dan rancangan model pengelolaan lingkungan lahan basah berbasis masyarakat disusun berdasarkan prinsip pendekatan bottom up dengan tujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat Banjarmasin sendiri dan menjadikan mereka sebagai partner dalam dalam pengelolaan lingkungan.

3.2 Model Bottom Up Kerja Sama Sister City Dengan Pelibatan Aktif Masyarakat Dalam Penanggulangan Lingkungan Lahan Basah Di Banjarmasin

Kota Banjarmasin merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu solusi untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh kota Banjarmasin adalah dengan membentuk jaringan kerja sama pemerintahan antarkota antarnegara. Tidak hanya untuk meningkatkan potensi yang dimiliki Kota Banjarmasin, kerja sama *sister city* juga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan utama kota Banjarmasin yaitu permasalahan penataan lingkungan, secara khusus lingkungan lahan basah. Salah satu bentuk jaringan kerjasama adalah dengan kemitraan kerja sama *sister city*. Kerja sama ini dilakukan dengan kota di dalam maupunluar negeri, umumnya dilakukan dengan kota di luar negeri. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian kerja sama Pemerintah Kota Banjarmasin sejauh ini masih belum ada kerja sama *sister city* yang dilakukan baik dalam penanggulangan masalah lingkungan lahan basah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan terdapat upaya untuk melakukan inisiasi kerja sama *sister city* khususnya dalam penanggulangan lingkungan lahan basah Banjarmasin. Kegiatan kerja sama dan kemitraan ini bertitik berat pada pengembangan hubungan persahabatan diplomatik serta keuntungan bagi kedua belah pihak khususnya dalam menyelesaikan permasalahan kota.

Upaya mengatasi masalah lingkungan yang hanya bertumpu pada pembangunan yang dilaksanakan olehpemerintah kota sampai kini terbukti masih tidak efektif untuk mengatasi atau mengurangi masalah lingkunganlahan basah Banjarmasin. Sehingga diperlukan model pengendalian lingkungan lahan basah secara terpadu dan komprehensif dengan mengacu pada upaya pembangunan non struktur khususnya jalinan kemitraan (kerja sama) yang melibatkan seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan baik dalam maupun luar negeri.

Penelitian ini mengusulkan pemerintah mampu melibatkan semua pihak untuk bersama-sama melaksanakan sistem pengendalian lingkungan lahan basah dengan pelibatan aktif masyarakat. Pelibatan aktif masyarakat tersebut tercermin dalam model kerja sama sister city bottom up. Dalam model ini, kerja sama sistercity yang dilakukan antar kota antarnegara dalam penanganan lingkungan lahan basah dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan perjanjian. Kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk penataan sungai, darah gambut, pengelolaan lingkungan lahan basah, pemetaan daerah rawan bencana lingkungan perRT per Kelurahan, relokasi permukiman tepian sungai, perbaikan tata ruang dan penghijauan, reboisasi erosiDAS, penetapan sempadan sungai, penyampaian informasi publik serta penguatan informasi dan manajemensampah (Gusti, 2013).

Pada Gambar 2 disajikan secara lengkap gambaran model tata kelola lingkungan lahan basah (*wetland governance*). Model tata lingkungan lahan basah dalam model ini adalah pengelolaan lingkungan lahan basah secara terpadu. Model ini mengandung pengertian bahwa unsur-unsur atau aspek-aspek yang menyangkut lingkungan dapat dikelola dengan optimal sehingga terjadi sinergi positif yang akan meningkatkan kinerja lingkungan lahan basah dalam menghasilkan output.

p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

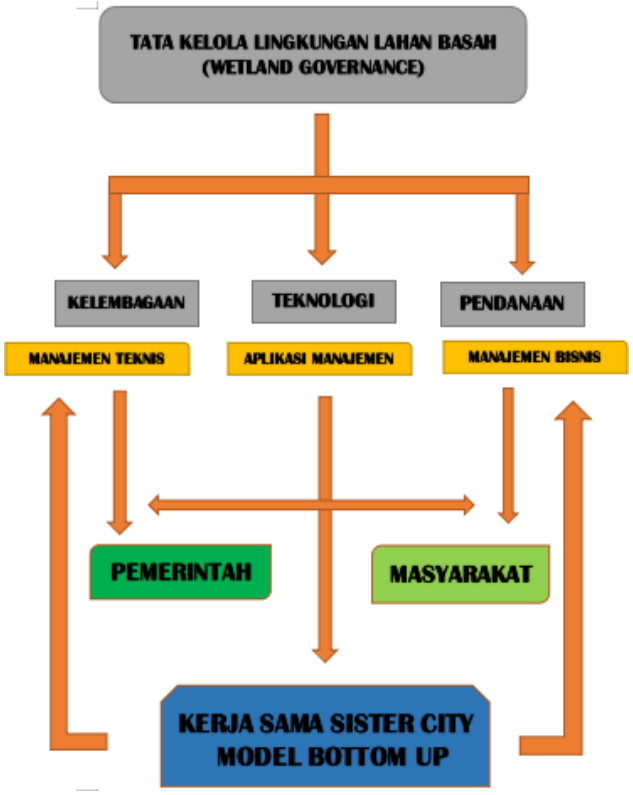

Gambar 2. Model Kerja Sama *sister city bottom up* dalam Penanganan lingkungan lahan basah Banjarmasin.

Selama ini metodologi perencanaan pengelolaan lingkungan lahan basah secara terpadu kurang memperhatikan aspek-aspek yang mengintegrasikan antara kelembagaan, teknologi, dan pendanaan. Model ini juga mendeskripsikan idealnya dalam tata kelola lingkungan lahan basah di akamodir berbagai kepentingan kegiatan pembangunan, misalnya antara kepentingan pengembangan pariwisata dan pertanian, kepentingan industri, kepentingan daya dukung lingkungan (*ecological demands*). Perkembangan pembangunan di bidang permukiman, pertanian, perkebunan, industri, eksploitasi SDA berupa penambangan, dan eksploitasi hutan menyebabkan penurunan kondisi hidrologis lingkungan. Pentingnya posisi lingkungan lahan basah sebagai unit pengelolaan yang utuh merupakan konsekuensi logis untuk menjaga kesinambungan pemanfaatan sumberdaya hutan, tanah, dan air. Kurang tepatnya perencanaan dapat menimbulkan adanya degradasi lingkungan yang mengakibatkan lahan menjadi gundul, tanah/lahan menjadi kritis dan mempengaruhi resapan air. Pada akhirnya proses degradasi tersebut dapat menimbulkan banjir yang besar di musim hujan, debit sungai menjadi sangatrendah di musim kemarau, kelembaban tanah di sekitar hutan menjadi berkurang di musim kemarau sehinggadapat menimbulkan kebakaran hutan, terjadinya percepatan sedimen pada waduk-waduk dan jaringan irigasi yang ada, serta penurunan kualitas air (Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, 2008).

Berdasarkan hasil analisa model diatas, perencanaan lingkungan lahan basah juga tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral saja, melainkan perlu adanya keterkaitan antar sektor yang mewakili masing-masing sub lingkungan lahan basah, secara khusus antara masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan lingkungan lahan basah harus menjadi fokus perhatian dengan berpegang pada prinsip '*one environment one management*'. Keterkaitan antar sektor meliputi perencanaan APBD, perencanaan sektor/program/proyek hingga pada tingkat koordinasi semua instansi atau lembaga terkait dalam pengelolaan lingkungan lahan basah. Lingkungan lahanbasah sebagai bagian dari wilayah lingkungan secara keseluruhan merupakan sumberdaya yang mengalir (*flowing resources*), dimana pemanfaatan lingkungan lahan basah di suatu daerah akan mempengaruhi daerah sekelilingnya. Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu perencanaan terpadu dalam pengelolaan lingkungan lahan basah dengan melibatkan semua sektor terkait, seluruh stakeholder dan daerah yang ada dalam lingkup wilayah lingkungan lahan basah.

Tata kelola lingkungan lahan basah yang disinergikan dengan kerja sama internasional sister city dengan pendekatan bottom up (keterlibatan masyarakat) adalah upaya komprehensif dalam tata kelola lahan basah. Secara spesifik *model sister city bottom up* adalah:

1. Model ini dimulai dengan identifikasi permasalahan lingkungan lahan basah di setiap wilayah kota Banjarmasin serta kajian Komprehensif tentang strategi penyelesaian lingkungan lahan basah menurut perspektif masyarakat dan para ahli lingkungan dan tata perkotaan.
2. Jenis kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Kota akan mendorong masyarakat untuk ikut mengerjakan secaraaktif implementasi kebijakan tersebut.

3. Model ini memandang proses kebijakan sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus.
4. Model ini dilaksanakan secara kolektif, melibatkan unsur-unsur governance dan mengandalkan persuasi. Argumentasi utama dari model ini adalah :
    1. Kinerja (performance, outcome) dan efektif
    2. Social virtue (kearifan lokal)
    3. Substansial dari daerah mikro ke daerah yang lebih luas (masyarakat ke pemerintah)
    4. Cenderung bersifat trend oriented, responsif dan jangka pendek
    5. Membawa substansi mikro yang bersifat lokal
    6. Sumber utama pendekatan: masyarakat, swasta dan LSM

Model Kerja sama *sister city bottom up* ini adalah perencanaan kerja sama internasional dalam penanggulangan lingkungan lahan basah dimana masyarakat lebih berperan dalam memberikan gagasan dari inisiasi awal kegiatan, implementasi hingga pelaksanaan evaluasi. Dalam hal ini pemerintah kota Banjarmasinhanya berperan sebagai fasilitator pembangunan. Secara umum model kerja sama *sister city bottom up* ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah masyarakat mampu memiliki peran aktif dalam memberikan gagasan dalam pengembangan program penataan kota. Selain itu, masyarakat juga bisa mengetahui dengandetail pelaksanaan penanggulangan lingkungan lahan basah dari mulai awal kegiatan hingga evaluasi. Namun, model kerja sama ini juga memiliki beberapa kelemahan, yakni peran pemerintah tidak begitu optimal dan hanya menjadi fasilitator dalam implementasi kerja sama. Selain itu kerap terjadi kesalahpahaman antara masyarakatdengan pemerintah karena perbedaan pandangan dalam banyak hal (Weibleder & Lackner, 2013).

Secara singkat, pendekatan government dalam upaya kerja sama *sister city* penanggulangan lingkungan lahan basah ini mengandaikan bahwa pemerintah kota Banjarmasin merupakan lembaga pendorong (*agenda setting*) pembuatan kebijakan dalam penanganan lingkungan lahan basah dengan mendorong keterlibatan aktorlain seperti masyarakat perkotaan untuk ikut terlibat aktif dalam pembuatan kerja sama penanganan lingkungan lahan basah. Di era globalisasi dan otonomi saat ini, kerja sama sangat dibutuhkan untuk menjawab permasalahan daerah yang kerap terabaikan dan tidak bisa terselesaikan dengan baik (Weibleder & Lackner,2013).

Kata kunci dari kerberhasilan kerja sama ini adalah tanggung jawab, keputusan, dan aksi nyata saat bencana terjadi dan bagaimana evaluasi dilakukan. Kesemuanya ditanggung bersama oleh pemerintah kota (*municipality*) dan warga (*resident*). Pelaksana dari model kerja sama ini terletak pada upaya pemerintah kotabeserta masyarakatnya (Pribadi, 2007). Pemerintah kota bertindak sebagai f*orecaster* melakukan pemantauanterhadap daerah-daerah rawan lingkungan lahan basah serta memberikan pembinaan kepada warga. Pemerintah kota juga selayaknya menjalin kerja sama dengan relawan dan LSM dalam memberi bantuan baikberupa dana dan tenaga kepada masyarakat. Masyarakat juga diupayakan untuk selalu terlatih dalam upaya preventif pencegahan dalam situasi kritis bencana sehingga mampu memberikan respon terbaik ketika kondisidarurat terjadi. Kesiapsiagaan, ketangguhan serta partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menghadapi permasalahan lingkungan lahan basah (BNPB, 2016).

Kerja sama *sister city model bottom up* ini merupakan upaya untuk melibatkan semua pihak khususnyamasyarakat sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan kolektif, dan mendorong keterlibatan serta komitmen bersama untuk melaksanakannya. Meskipun terdapat beberapa kelemahan dalam model ini khususnya memerlukan banyak waktu dan tenaga dalam perencanaannya tetapi harapannya hasilnya bisa lebih efektif dalam penanggulangan lingkungan lahan basah. Model kerja sama *sister city bottom up* ini merupakan perencanaan pembangunan kota berdasarkan pembangunan partisipatif.

Pemerintah Kota Banjarmasin selayaknya mencoba melakukan perencanaan pembangunan partisipatif dalam rangka untuk menggali aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui musyawarah baik dalam tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan maupun kota. Perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dalam kerjasama internasional ini merupakan pola pendekatan yang melibatkan peran aktif masyarakat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan dan penyelesaian permasalahan kota benar-benar merupakan penyelesaian dari bawah (*bottom-up approach*). Meskipun demikian, perencanaan pembangunan dan penyelesaian permasalahan kota yang melibatkan semua unsur dan komponen masyarakat tersebut merupakan langkah positif yang patutuntuk dicermati dan dikembangkan secara berkesinambungan baik dalam tataran wacana pemikiran maupun dalam tataran implementasinya di tengah-tengah masyarakat khususunya yang berkiatan dalam fora internasional. Sekaligus, pendekatan ini merupakan pendekatan baru dalam penyelesaian masalah lingkungan lahan basah Banjarmasin yang selama ini cenderung tidak efektif dan sentralistik (Wilson, 2015).

4. SIMPULAN

Pemerintah Kota tidak mungkin mampu merespons segala aspek dalam upaya pengelolaan lingkungan apabila tidak melakukan koordinasi dengan baik dengan berbagai pihak. Upaya pengelolaan lingkungan lahanbasah bisa dilakukan oleh pemerintah apabila dibantu oleh masyarakat tentu akan memperoleh hasil yang optimal. Oleh karena itu, penelitian tentang model kerja sama *sister city* terkait tata kelola lingkungan lahan basah (*wetland Governance*) dengan pelibatan masyarakat merupakan cara baru yang efektif

untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan lahan basah di kota Banjarmasin.

Di dalam model kerja sama *bottom up* tersebut masyarakat diminta untuk aktif dalam proses perumusan dan proses implementasi kerja sama. Pada prinsipnya kebijakan pengelolaan lingkungan lahan basah secara terpadu merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mengurangi dan menghadapi permasalahan sumberdaya alam baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kebijakan ini oleh karenanya merupakan bagian terintegrasi dari kebijakan lingkungan yang didasarkan pada data akademis maupun teknis, beragamnya kondisi lingkungan pada beberapa daerah dan perkembangan ekonomi dan sosial sebagai sebagai suatu keseluruhandimana perkembangan daerah. Model kerja sama sister city bottom up kemudian dibuat berdasarkan permasalahan tersebut. Kerja sama ini merupakan upaya untuk melibatkan semua pihak khususnya masyarakat sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan kolektif, dan mendorong keterlibatan serta komitmen bersama untuk melaksanakannya. Meskipun terdapat beberapa kelemahan dalam model ini khususnya memerlukan banyak waktu dan tenaga dalam perencanaannya tetapi harapannya hasilnya bisa lebih efektif dalam penanggulangan lingkungan lahan basah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM ULM yang memberikan pendanaan dalam pelaksanaanpenelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Al Syahrin, M.N. *et al.* (2019). Sister City Bottom Up Collaborative Model Plan As a Major Flooding Mitigation in Samarinda. Environmental Science, Society, and Technology. *WESTECH*. 1-12.

Al Syahrin, M.N. *et al.* (2020). Bottom-Up Model Analysis of Community Involvement in the Sister CityCooperation for Flood Mitigation in East Kalimantan. *Revista UNISCI*. 53: 143-153.

Balanthine, J. (2014). How Sister City Partnerships Can Play A New Role In A Global Economy, Cities Today.Washington.

Baritono, R. (2017). Eleanor Roosevelt at the United Nations: "Diplomacy from Below" and the Search for a New Transatlantic Dialogue, European. *Journal of American Studies*. 1(12).

Boersma, R.G. (2015). The Success of Sister City Partnerships Between Dutch Municipalities and A Municipality In A CEEC : Formalized Between 1989-2000. Master Thesis in Public Administration. Track Public Management.

Buckley, P.H. & Takahashi, A. & Anderson, A. (2015). The Role of Sister Cities' Staff Exchanges in Developing"Learning Cities": Exploring Necessary and Sufficient Conditions in Social Capital Development Utilizing Proportional Odds Modeling. *Environment Res Public Health*. 12(12).

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air. (2008). Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Terpadu. Tersedia di https://www.bappenas.go.id/files/1213/5053/3289/17kajian-model-pengelolaan-daerah-aliran-sungai-das-terpadu_20081123002641_16.pdf. Diakses pada 1 Oktober 2020.

Domai, T. (2011). Sound Governance. Universitas Brawijaya Press. Malang.

Fitri, H. R. & Rani, F. (2013). Implementasi Kerjasama Sister City: Studi Kasus Sister City Bandung- Braunschweig (Tahun 2000 – 2013). *Transnasional*. 1(5).

Kalsel Pos. (2019). DLH gencarkan Proklim di Banjarmasin. Tersedia di https://kalselpos.com/2019/03/28/dlh- gencarkan-proklim-di-banjarmasin/. Diakses pada 1 Oktober 2020.

Kalsel Pos. (2019). DLH ingin Luncurkan Kawasan "Kampung Iklim". 28 Maret 2019. Selengkapnya di https://kalselpos.com/2019/03/28/dlh-ingin-luncurkan-kawasan-kampung-iklim/. Diakses pada 1 Oktober 2020.

Kaltenbrunner, A. (2010). Not All Paths Lead To Rome: Analysing The Network of Sister Cities. Barcelona Media Foundation. Barcelona.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2018). Corrective Action Tata Kelola Gambut Di Indonesia Menuju Ekosistem Gambut Berkelanjutan. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut. Jakarta.

Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah. (2004) Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Lahan Basah Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta.

Mukti, T. A. (2013). Paradiplomasi: Kerja Sama Oleh Pemda Di Indonesia. The Phinisi Press. Yogyakarta.

Nye, J.S. & Keohane, R. (2003). Transnational Relations And World Politics. *International Organization*. 3(3).

Ogawa, A. (2012). Sister City As A Preservation Strategy. Thesis in Historic Preservation Graduate School of Architecture, Planning and Preservation. Columbia University.

Pikiran Rakyat. (2019). Tingkatkan Kesadaran Lingkungan, Bank Sampah di Banjarmasin Lakukan Inovasi Jemput Sedekah Sampah. Tersedia di https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01325865/ tingkatkan-kesadaran-lingkungan-bank-sampah-di-banjarmasin-lakukan-inovasi-jemput-sedekah-sampah?page=2]. Diakses pada 1 Oktober 2020.

Pribadi, S. (2007). Peneliti Bidang Tsunami Modelling dan Forecasting. Tersedia di http://www.beritaiptek.com/zberita-beritaiptek-2007-04-04-Belajar-Bagaimana-Jepang-Memerangi-Banjir.shtml. Diakses 21 Mei 2018.

Rahmi, *et al.* (2015). Lahan Basah Terpadu di Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*. 20 (3): 201-207.

Subhan, *et al*. 2012. Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Banjir Di Kota Banjarmasin. *EnviroScienteae*. 8: 135-145.

Weibleder, S & Lackner, H. (2014). Top-Down and Bottom-Up Approach for Model.

Wilson, J (2015). Top down and bottom up. NCLB Charter School and The Public School Principalship.